

Perencanaan penggunaan lahan untuk  
pembangunan rendah emisi

*Luwes*

Land-use planning for low-emission  
development strategies

# NEWS BULLETIN

VOLUME I NO.2/NOVEMBER 2014

## DARI RENCANA AKSI MENUJU UPAYA NYATA PEMBANGUNAN RENDAH EMISI DI KABUPATEN JAYAPURA

From Action Plan To Actual Efforts of Low-  
Emission Development Strategies in the  
Jayapura Regency



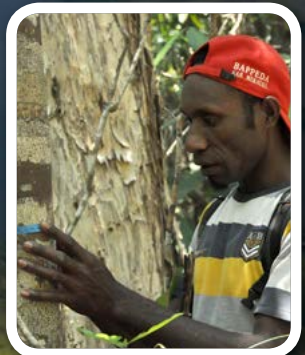
## BELAJAR CINTAI ALAM DARI WARGA KAMPUNG ADAT WAMBENA

Learning to Love Nature from the  
Wambena Village Tribe | Wambena Village:  
Safeguarding natural resources



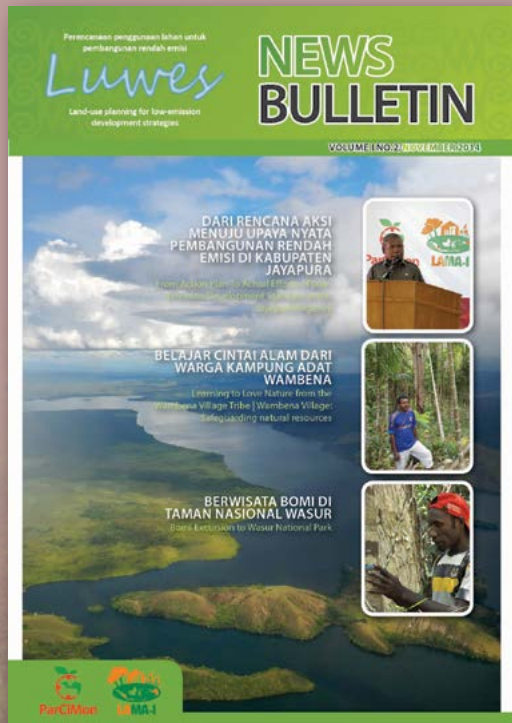
## BERWISATA BOMI DI TAMAN NASIONAL WASUR

Bomi Excursion to Wasur National Park



# Dari Redaksi

## Editor's notes



Strategi pembangunan rendah emisi yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan juga negara-negara lainnya saat ini menjadi program yang terus didukung dan salah satu upaya mendukung hal tersebut adalah penyebaran informasi yang terkait dengan program-program pembelajaran dari lapangan atau dari stakeholder lainnya dalam upaya penyempurnaan program yang sedang dan akan berjalan demi terwujudnya pembangunan rendah emisi yang diharapkan.

Tanpa terasa edisi kedua News Bulletin LUWES yang diterbitkan oleh ICRAF sebagai sarana penyebaran informasi kembali hadir menyapa para pembaca dengan beragam cerita pengalaman dari pelaksanaan program strategi pembangunan rendah emisi di Indonesia.

Edisi kali ini akan mengangkat laporan dari pelaksanaan Project Advisory Committee (PAC) Meeting yang telah dilaksanakan oleh program *Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia*

The low-emission development strategy that has become the current focus of the Indonesian government and also other countries is continually given support, and one form of such support is the dissemination of information related to programs that facilitate the analysis of lessons learnt in the field or from other stakeholders with the aim of improving programs that are currently being or which will be implemented, in order to ultimately achieve envisioned low-emission development.

It seems that time has barely passed before this second edition of the ICRAF published LUWES News Bulletin is back again to bring to readers various stories on the experiences found in the implementation of low-emission development strategy program in Indonesia.

The current edition present reports on the Project Advisory Committee (PAC) Meeting hosted by the *Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia*

(LAMA-I) yang dilanjutkan dengan rangkaian kunjungan ke salah satu provinsi lokasi program yaitu Sumatera Selatan. Kunjungan tersebut merupakan upaya program dalam memicu sinergitas multipihak proyek LAMA-I di daerah yang diikuti oleh perwakilan dari *Environmental Support Programme* (ESP3) DANIDA, Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Hutan, dan mitra pelaksana proyek (CCROM dan GlZ).

Selain itu, pembelajaran yang cukup menarik dari proses dan tahapan dalam penyusunan strategi pembangunan rendah emisi di Kabupaten Jayapura adalah konsultasi publik. Tahapan ini sudah dilakukan oleh Kelompok Kerja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi Kabupaten Jayapura atau Pokja IPRE yang telah berhasil mengidentifikasi delapan aksi kegiatan berbasis lahan yang mampu menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca di Jayapura. Aksi mitigasi tersebut telah dikonsultasikan di depan publik untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaannya di Kabupaten Jayapura.

Salah satu yang menarik dari edisi kali ini adalah wawancara dengan Bapak Ir. Basah Hernowo, MA yang merupakan Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas. Selama ini, Bappenas selalu konsisten dan sangat mendukung setiap program dalam upaya penyusunan strategi pembangunan rendah emisi di Indonesia.

Akhir kata, kami dari redaksi mengucapkan selamat membaca.

Salam lestari

(LAMA-I) followed by a series of visits to South Sumatera, where the program sites are located. The visits were a part of the program's effort to promote multiparty synergy for the LAMA-I project in the regions, participated by representatives from the Environmental Support Programme (ESP3) DANIDA, Center for Research and Development Center for Climate Change and Forest Policeis, and project implementing partners (CCROM and GlZ).

Additionally, the interesting lesson learnt from the process of and various stages involved in the formulation of low-emission development strategy in the Regency of Jayapura is public consultation. This aspect has been implemented by the Low-Emission Development Initiative (IPRE) Working Group of the Jayapura Regency, which has successfully identified eight land-based actions that are able to reduce the greenhouse gas emissions in Jayapura supported by the ParCiMon project. The mitigation measure has been consulted with the public for feedback in relation to the developments in the Jayapura Regency.

Another interesting feature of this edition is the interview with Mr. Ir. Basah Hernowo, MA, Director of Forestry and Water Resources Conversation of Bappenas. Thus far Bappenas has been consistent and highly supportive of every program that aims to formulate low-emission development strategies in the country.

In closing, the editorial staff hope you enjoy the bulletin.

Regards

**EDITORIAL TEAM**  
**LUWES NEWS BULLETIN**  
Volume I No.2  
November 2014

<b>Editors in chief</b>	:	Suyanto and Sonya Dewi
<b>Managing editors</b>	:	Robert Finlayson, Burhanuddin Zein, Andree Ekinadina, Feri Johana, and Yessi Dewi Agustina
<b>Contributors</b>	:	ParCiMon and LAMA-I team, YKPM
<b>Layout and design</b>	:	Sadewa and Riky Mulya Hilmansyah
<b>Editorial secretariat</b>	:	Tikah Atikah, Cintin Sakina
<b>Cover photo</b>	:	Feri Johana, Asri Joni, and Yessi Dewi Agustina



# Daftar Isi

## Table of Contents



**02 DARI REDAKSI**  
Editor's notes

**05 KABUPATEN BANYUASIN, PELOPOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH EMISI DI SUMATRA SELATAN**  
Banyuasin District: a pioneer of low-emission development planning in South Sumatra

**08 PROGRAM LAMA-I WUJUD NYATA KOMITMEN INDONESIA DALAM PENURUNAN EMISI**  
The LAMA-I Program, Indonesia's real commitment to reducing emissions

**11 DARI RENCANA AKSI MENUJU UPAYA NYATA PEMBANGUNAN RENDAH EMISI DI KABUPATEN JAYAPURA**  
From Action Plan To Actual Efforts of Low-Emission Development Strategies in the Jayapura Regency

**14 KUNJUNGAN PAC MEMICU SINERGISME DARI BERAGAM PIHAK PROGRAM LAMA-I DI SUMATRA SELATAN**  
A visit by the Project Advisory Committee encourages synergy within LAMA-I in South Sumatra

**16 BELAJAR CINTAI ALAM DARI WARGA KAMPUNG ADAT WAMBENA**  
Learning to Love Nature from the Wambena Village Tribe | Wambena Village: Safeguarding natural resources

**18 BERWISATA BOMI DI TAMAN NASIONAL WASUR**  
Bomi Excursion to Wasur National Park

**21 WAWANCARA / INTERVIEW**  
Basah Hernowo, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air (Director of Forestry and Conservation of Water Resources), Bappenas



# Kabupaten Banyuasin, Pelopor Perencanaan Pembangunan Rendah Emisi di Sumatra Selatan

Banyuasin District: a pioneer of low-emission  
development planning in South Sumatra



Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu lokasi Program LAMA-I di Provinsi Sumatera Selatan selain Kabupaten Musi Rawas dan Musi Banyuasin. Selama tahun pertama pelaksanaan proyek LAMA-I di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin menjadi kabupaten yang cukup maju dalam menyusun strategi pembangunan rendah emisi. “Kabupaten Banyuasin menjadi yang terdepan dan pionir dalam mendukung kegiatan Proyek LAMA-I, mengingat komitmen pemerintah Kabupaten Banyuasin dan didukung oleh inisiatif positif Pokja Kabupaten Banyuasin,” ujar Yohanes Siholan, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, ketika membuka pertemuan pelaksana Proyek LAMA-I dengan Bupati Banyuasin pada 22 September 2014.

Adanya dukungan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dari program LAMA-I memungkinkan Pokja Kabupaten Banyuasin untuk menyusun strategi pembangunan rendah emisi di Kabupaten Banyuasin. Romlah dari Pokja Kabupaten Banyuasin menjelaskan bahwa setelah mendapatkan pelatihan dari LAMA-I, Pokja Kabupaten Banyuasin mampu menyusun beberapa program dan skenario pembangunan rendah emisi, contohnya meningkatkan intensifikasi untuk mencegah perluasan kawasan persawahan, penanaman kembali hutan bakau, dan perluasan tutupan hutan sebagai bentuk tindakan mitigasi.

Romlah menambahkan misi Pokja Kabupaten Banyuasin adalah untuk tetap meningkatkan pendapatan demi kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan wawasan lingkungan.

Banyuasin District is one of three LAMA-I sites in South Sumatra Province in addition to the districts of Musi Rawas and Musi Banyuasin. During the first year of the LAMA-I implementation in South Sumatra, Banyuasin became the most advanced district in developing a low-emission development strategy.

“Banyuasin has succeeded in being the leader and a pioneer in supporting the LAMA-I. This is evident from the local government’s commitment and support, and the positive initiative of the Banyuasin Working Group,” said Yohanes Siholan (head of South Sumatra Provincial Development Planning Agency), when opening the LAMA-I hearing with Banyuasin District Government, on 22 September 2014.

From the training that LAMA-I has given, aimed at developing the capacity of the local government, the Banyuasin District Working Group has been able to develop a low-emission development strategy for the district.

Romlah, a member of the Banyuasin District Working Group, stated that after the training programme, LAMA-I gave to the Banyuasin District Working Group, the group has been able to develop several programs and scenarios in the planning of the low-emission development strategy. Our mitigation actions will include increasing intensification, to prevent the expansion of paddy fields, mangrove reforestation and forest expansion. Romlah also added that the mission of Banyuasin District Working Group is to increase local incomes while remaining environmentally friendly.

*photos: Feri Johana/World Agroforestry Centre*





Pokja yang terdiri dari SKPD, kalangan akademisi, komunitas pemerhati lingkungan dan masyarakat ini berpendapat bahwa LAMA-I dapat menjadi alat bantu bagi kabupaten untuk menerjemahkan Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang sampai saat ini baru sampai di tingkat provinsi.

Adios dari Yayasan Bumi Hijau, salah satu anggota Pokja Kabupaten Banyuasin, turut menyampaikan apresiasi dan dukungan untuk LAMA-I. Adios berpendapat bahwa LAMA-I merupakan kesempatan baik bagi Kabupaten Banyuasin untuk menangkap arahan strategi penurunan emisi di tingkat kabupaten dengan menggunakan perangkat yang dikembangkan proyek ini. Banyuasin diharapkan akan dapat memberikan kontribusi dalam penurunan emisi terhadap REL Provinsi Sumatra Selatan.

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian SH menyatakan bahwa suatu kehormatan bagi Kabupaten Banyuasin dapat terpilih sebagai lokasi LAMA-I untuk mendukung pembangunan rendah emisi dan ekonomi hijau. Dalam rangka meningkatkan dukungan untuk LAMA-I dan menjadi kabupaten yang dapat menjadi contoh untuk lokasi lain, Bupati Banyuasin menginstruksikan kepala dinas SKPD terkait untuk menyelaraskan program kegiatan di Kabupaten Banyuasin dengan kegiatan LAMA-I. Menurut Yan Anton, tanpa adanya keselarasan yang baik antara SKPD di kabupaten dengan LAMA-I, tujuan yang ingin dicapai bersama tidak akan dapat dilakukan atau diimplementasikan dengan baik.

Bupati Banyuasin berharap Kepala Dinas di masa depan dapat mendelegasikan personel yang tepat untuk pelatihan pengembangan kapasitas yang dilakukan di dalam LAMA-I dengan harapan pengetahuan yang didapatkan oleh personel yang dikirim dapat menjadi aset yang bermanfaat baik bagi SKPD maupun masyarakat luas.

Pertemuan yang diselenggarakan di Kantor Bupati Kabupaten Banyuasin ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan LAMA-I di Provinsi Sumatra Selatan, sekaligus untuk melaporkan pelaksanaan Proyek di tahun pertama periode Juli 2013-Juli 2014. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah mengadakan pertemuan antara pelaksana LAMA-I dan seluruh SKPD terkait untuk menggabungkan kegiatan yang ada dan mendiskusikan skenario pembangunan rendah emisi yang telah disusun oleh Pokja agar dapat berfungsi sebagai aksi mitigasi penurunan emisi di tingkat kabupaten.

The Banyuasin District Working Group, which consists not only of the local government but also academics, environmentalists and local communities, feels that LAMA-I can be used as a tool for the district to translate the local action plan for GHG Emission Reduction (RAD-GRK). However, until now this is only down to the provincial level.

Adios, from the Bumi Hijau Foundation, as a member of the group, also expressed appreciation and endorsed LAMA-I. He said LAMA-I was a good opportunity for the district to capture the direction for emission reduction strategies at the district level by using tools developed by the LAMA-I. He also expects Banyuasin to contribute to the emission reduction target in the future through REL in South Sumatra.

Yan Anton Ferdian SH, (Banyuasin Bupati) said that it was an honor for the Banyuasin District to be chosen as the location for the LAMA-I Project and to support low-emission development strategies and a green economy. To increase the district support for the LAMA-I and to be a role model for other districts, Yan Anton Ferdian SH, instructed the heads of the local agency in Banyuasin to synergize their programs and related activities with LAMA-I activities. He stressed that in the absence of good synergy between local governments with LAMA-I, the intended target could not be achieved.

In the future the Banyuasin Bupati expects the heads of local agencies in Banyuasin district to delegate the right personnel for capacity building activities undertaken by LAMA-I. The transfer of knowledge from the training, will be a useful asset for local agencies as well as a wider audience.

The hearing was held in the Banyuasin Regency Office to strengthen the local government's commitment to the implementation of the LAMA-I Project in South Sumatra. LAMA-I also reported the project's first year of implementation in South Sumatra. As a follow-up to this meeting, LAMA-I and Banyuasin District local agency will hold coordination meetings to synergize the activities and discuss the low-emission development scenarios prepared by the Working Group. These scenarios will be translated into mitigating actions to reduce emissions at the district level.

*Text by: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre*

# Sebuah Dukungan Terhadap Komitmen Indonesia dalam Penurunan Emisi

A support for Indonesia's commitment to reducing emissions

Sebagai salah satu negara yang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi melalui pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 26% di bawah proyeksi secara mandiri dan hingga 41% dengan dukungan multilateral pada 2020, Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah nyata dalam mewujudkan komitmen tersebut. Salah satunya melalui program aksi mitigasi lokal di sektor berbasis lahan (*Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia/LAMA-I*) yang kini tengah diujicobakan di 6 kabupaten di Indonesia, di antaranya Kabupaten Jayawijaya, Jayapura, Merauke di Provinsi Papua dan Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan.

LAMA-I merupakan program yang didukung oleh Departemen Pembangunan Internasional Pemerintah Denmark (DANIDA) dan diinisiasi oleh ICRAF, bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific, Institut Pertanian Bogor (CCROM - IPB), untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penurunan emisi nasional dan emisi dunia. Program LAMA-I sendiri berfokus pada pembangunan

Indonesia is committed to independently reducing greenhouse gas emissions by 26% below business as usual projections and up to 41% with multilateral support by 2020. Various efforts and concrete steps are now being made in Indonesia to realize these targets. One effort will be through local mitigation action programs in the land-based sector (*Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia / LAMA-I*), which is now being piloted in six districts in Indonesia (Jayawijaya, Jayapura and Merauke in Papua, and Musi Rawas, Musi Banyuasin and Banyuasin in South Sumatra).

LAMA-I is supported by the Danish International Development Agency (DANIDA) and initiated by ICRAF in collaboration with the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) and the Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific, Bogor Agriculture University (CCROM-IPB) to support the Indonesian government's commitment in achieving national emission reductions and world emissions. LAMA-I is focusing on building the capacity of local governments in planning for low-emission development strategies for the land-based sector.





photos: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre

kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan rendah emisi di sektor berbasis lahan.

Sejak diluncurkan pada 2013, pelaksanaan program LAMA-I mendapatkan sambutan positif dari pihak-pihak terkait. Pencapaian program LAMA-I pada tahun pertama pelaksanaan disampaikan pada rapat tahunan PAC (*Project Advisory Committee*/Komite Penasihat Proyek) yang diselenggarakan pada 25 Agustus 2014 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Beberapa keberhasilan Program LAMA-I ini dijelaskan oleh Dr. Suyanto dari ICRAF, selaku pimpinan proyek LAMA-I. Dr. Suyanto memaparkan bahwa program LAMA-I telah menyelesaikan draf laporan sintesis putaran pertama RAD-GRK dan pengumpulan data primer cadangan karbon, keanekaragaman hayati, hidrologi, dan profitabilitas ekonomi di Papua dan Sumatra Selatan.

Selain itu, Program LAMA-I telah berhasil melakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk mendorong upaya pembangunan rendah emisi, terutama pada sistem pembentukan MRV Nasional. Sudah ada upaya untuk menggabungkan dan menyelaraskan LAMA-I dengan program serupa, khususnya dengan *Program Participatory Monitoring by Civil Society of Land-Use Planning* (ParCiMon) yang dikelola oleh ICRAF di Papua dan Program Bioclimate yang dikelola oleh GIZ di Sumatra Selatan.



Since the initial launch in 2013, the implementation of LAMA-I has received positive feedback from stakeholders. LAMA-I achievements, in the first year of implementation, were submitted and presented by Dr. Suyanto (project leader) to the annual meeting of PAC (Project Advisory Committee), which was held on 25 August 2014 at Hotel JS Luwansa, Jakarta. In accordance with the RAD-GRK and REDD+ documents, LAMA-I has completed the first round of the draft synthesis report, and collected primary data on carbon stocks, biodiversity, hydrological and economic profitability in Papua and South Sumatera.

LAMA-I has also managed to support stakeholders at the national level in order to encourage the development of low-emission strategies, particularly in the National MRV system formation. The efforts to synergize and harmonize LAMA-I with similar programs have been undertaken,

Dr. Sonya Dewi, Country Coordinator ICRAF Indonesia, menambahkan daftar pencapaian LAMA-I dengan mengungkapkan bahwa dengan menggunakan perangkat LUMENS (*Land Use Planning for Multiple Environmental Services*), Pokja yang didampingi ICRAF telah berhasil mengembangkan desain awal dan prototipe perencanaan penggunaan lahan. Dr. Sonya Dewi juga mengatakan bahwa LUMENS adalah perangkat yang bermanfaat dalam proses negosiasi beragam pemangku kepentingan yang inklusif, terintegrasi, dan informatif untuk perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan yang dapat mendukung mata pencaharian, pembangunan, dan jasa ekosistem. Dua sesi pelatihan di Papua dan Sumatra Selatan dilakukan untuk dan menguji desain awal pengembangan kapasitas dan implementasi strategi LUMENS.

Rapat tahunan PAC dihadiri oleh seluruh anggota PAC, yang terdiri dari perwakilan Kedutaan Denmark (RDA/Danida), Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Hutan, Kementerian Kehutanan, dan mitra pelaksana program (CCROM dan GIZ).

Rapat tahunan PAC ini juga membahas rencana kerja tahun kedua LAMA-I. Masukan dari salah satu anggota PAC--wakil dari Kementerian PPN BAPPENAS Ir. Basah Hernowo yang memimpin jalannya rapat PAC--menyatakan bahwa LAMA-I merupakan kerja sama yang baik antara banyak pihak yang terlibat. LAMA-I dapat mendukung upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan mengidentifikasi potensi kerja sama beragam pihak, khususnya dalam upaya-upaya agroforestri di kawasan hutan tanpa merusak ekosistem yang ada.

Menutup rapat tahunan PAC, Basah mengingatkan seluruh anggota PAC bahwa dengan adanya pemerintahan yang baru, setiap pihak yang terlibat sebaiknya dapat mengantisipasi perubahan kebijakan yang mungkin akan terjadi. Selain itu, LAMA-I diharapkan akan dapat meningkatkan perhatian pemangku kebijakan, baik di tingkat nasional maupun di daerah, akan pentingnya pembangunan rendah emisi, sehingga komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi dunia dapat terealisasi dengan baik di masa depan.

especially with the Participatory Monitoring by Civil Society of Land Use Planning (ParCiMon) program in Papua, which is managed by ICRAF and the Bioclimate Program in South Sumatra, is managed by GIZ

Dr. Sonya Dewi, (ICRAF Country Coordinator) added to the list of LAMA-I achievements LUMENS (*Land Use Planning for Multiple Environmental Services*), the working group, assisted by ICRAF, has developed a preliminary design and land use planning prototype. Dr. Sonya pointed out that LUMENS is a useful tool in a multi-stakeholder negotiation process; it is inclusive, integrated and informative in sustainable land use planning, which can support livelihoods, and development and ecosystem services. The design capacity for the development and initial implementation of the strategy has been generated and tested in two training sessions, one in Papua and the other in South Sumatra.

The PAC annual meeting was attended by all members; representatives of the Danish Embassy (RDA/Danida), the Directorate of Forestry and Water Resources Conservation National Development Planning Agency (Bappenas), the Center of Climate Change Research and Development and Forests Policy Ministry of Forestry and the program implementing partners (CCROM and GIZ).

The PAC annual meeting also discussed the LAMA-I second year work plan and provided inputs. Bappenas representative Ir. Basah Hernowo, meeting chairman said, "LAMA-I is a good cooperation between the many parties involved. LAMA-I is expected to support the capacity building of local governments, and identify potential multi-stakeholder cooperations, especially in the development of agroforestry in the forest area without damaging existing ecosystems".

In his closing remarks, Ir. Basah reminded all PAC members that with the new government all parties involved should anticipate changes in policy. However, LAMA-I is expected to increase the attention of policy makers at both the national and local levels on the importance of low-emission development strategies so that in the future Indonesia's commitment to contribute to a reduction in global emissions can be realized.

# Dari Rencana Aksi Menuju Upaya Nyata Pembangunan Rendah Emisi di Kabupaten Jayapura

From Plan To Actual Efforts of Low-Emission Development Strategies in the Jayapura Regency



photo: Masayu Vinanda/World Agroforestry Centre

**K**elompok Kerja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi/IPRE Kabupaten Jayapura atau Pokja IPRE telah berhasil mengidentifikasi 8 aksi kegiatan berbasis lahan yang mampu menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca di Jayapura. Pokja IPRE yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Akademisi, LSM dan unsur masyarakat berinisiatif untuk merancang strategi perencanaan penggunaan lahan guna mendorong pembangunan rendah emisi di Kabupaten Jayapura.

**T**he Low-Emission Development Initiative (Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi – IPRE WG) Working Group for the Jayapura Regency has identified eight land-based actions that are expected to reduce greenhouse gas emission levels in Jayapura. The IPRE WG, which is comprised of various stakeholders from Regional Operating Units (SKPD), academics, NGOs and local communities, has taken the initiative to design a land utilization planning strategy in order to promote low-emission development strategies in the Jayapura regency.





photo: Feri Johana, Andree Ekadinata, Masayu Vinanda/World Agroforestry Centre

Aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca tersebut dituangkan ke dalam dokumen Strategi Pembangunan Rendah Emisi Kabupaten Jayapura. Penyusunan dokumen ini dipicu oleh meningkatnya populasi dan rencana pembangunan di berbagai aktivitas ekonomi yang dapat memberikan kontribusi terhadap lonjakan emisi gas rumah kaca.

Delapan aksi mitigasi tersebut dikelompokkan menjadi 2 kategori utama yaitu pencegahan penurunan cadangan karbon dan peningkatan cadangan karbon. Pencegahan penurunan cadangan karbon adalah kegiatan yang dilakukan dengan mempertahankan pepohonan yang ada di bentang lahan. Sementara peningkatan cadangan karbon meliputi kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah pepohonan dan mengembalikan kondisi tutupan lahan berhutan. Jika aksi mitigasi yang telah diidentifikasi oleh Pokja IPRE berhasil diterapkan, maka perkiraan total penurunan proyeksi emisi adalah 8,33 M ton CO<sub>2</sub> eq atau 14,09% dari total proyeksi emisi kumulatif Kabupaten Jayapura pada 2020.

Dokumen strategi pembangunan rendah emisi tersebut kemudian dibahas dalam dialog para pemangku kepentingan Kabupaten Jayapura pada acara konsultasi publik yang digelar oleh Pokja IPRE Jayapura pada 19 Mei 2014, di aula kantor Bupati Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw SE MSi, membuka secara resmi acara konsultasi publik tersebut dan menyampaikan bahwa konsultasi publik ini penting untuk memberikan masukan terkait pembangunan di Kabupaten Jayapura, dengan wilayah yang berpotensi sangat strategis dalam upaya penurunan emisi secara nasional. Konsultasi publik ini dilakukan untuk

The greenhouse gas mitigation action has been incorporated into the Jayapura Regency Low-Emission Development Strategy. The preparation of the document was prompted by rapid population growth and development plans for various economic activities that could potentially contribute towards increasing greenhouse gas emissions. With a forest area of 25.8 million hectares, Papua plays an important part as a province with substantial carbon reserves in Indonesia.

The eight mitigation measures can be divided into two main groups: safeguarding carbon reserves and increasing carbon reserves. Maintaining trees located within the landscape will help safeguard carbon reserves, while increasing the number of trees and restoring degraded forests will increase carbon reserves. Once the mitigation actions IPRE WG identified have been successfully implemented, the estimated total of reduced emissions will be 8.33 M tons of CO<sub>2</sub> or 14.09% of the total projected cumulative emissions for the Jayapura Regency up to the year 2020.

The low-emission development strategy document was then discussed in a dialogue among the Regency's stakeholders during a public consultation session held by the Jayapura IPRE WG on 19 May 2014, at the Assembly Hall of the Jayapura Regent Office. Jayapura's Regent, Mathius Awoitauw SE MSi, formally opened the event. Mathius pointed out that public consultation was essential to provide input related to development in Jayapura, the forest area of which has the potential to reduce the national emission levels. The public consultation was intended to encourage the involvement of various stakeholders in formulating a low-emission development strategy in the Jayapura Regency. It also aimed to raise the



melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan rendah emisi di Kabupaten Jayapura, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan upaya pembangunan rendah emisi.

World Agroforestry Centre (ICRAF) Indonesia, melalui program *Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-Emissions Development Strategies* (ParCiMon), turut mendukung Pokja IPRE dalam melahirkan dokumen strategi rencana mitigasi tersebut. Dr. Suyanto, pimpinan program ParCiMon, menjelaskan bahwa ParCiMon berbeda dengan program lain yang serupa. Dalam upaya mendorong pembangunan rendah emisi, ParCiMon mendorong partisipasi aktif kelompok masyarakat sipil yang berperan besar dalam mencapai pembangunan rendah emisi di kabupaten atau provinsi mereka. ParCiMon juga telah melalui proses panjang yang inklusif dan partisipatif dengan memfasilitasi terbentuknya kelompok kerja beragam pihak untuk mendorong pembangunan rendah emisi di Jayapura yang diikuti dengan pembentukan Pokja di dua kabupaten lainnya.

Berbagai kegiatan telah diselenggarakan oleh ICRAF, bekerja sama dengan Gugus Kerja Pembangunan Rendah Emisi Papua (PLCD-TF), Yayasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Papua (YKPM), Yayasan Lingkungan Hidup Irian Jaya (YALI), dan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, untuk meningkatkan kapasitas Pokja IPRE Jayapura. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan *Land-use planning for low-emission development strategies* atau LUWES. LUWES merupakan perangkat yang dikembangkan oleh ICRAF untuk membangun skenario pembangunan rendah emisi dan menyusun strategi implementasinya.



awareness of the broader public regarding low-emission development efforts.

ICRAF, through its Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-Emissions Development Strategies (ParCiMon Program), also supported the IPRE WG in developing a mitigation planning strategy document. Dr. Suyanto, (ParCiMon program leader) said that ParCiMon was different from other similar program in an effort to encourage the development of low-emissions; this program encourages civil society groups, who have a large role to play in achieving low-emissions development in their districts or provinces, to actively participate. ParCiMon has also gone through a long process that is inclusive and participatory by establishing multi-stakeholder working groups to encourage low-emission development in Jayapura, following the establishment of working group in two other districts.

A number of activities have been initiated by ICRAF in collaboration with the Papua Low-Carbon Development Taskforce (PLCD-TF), the Papua Society Conservation and Empowerment Foundation (YKPM), the Irian Jaya Environment Foundation (YALI) and the Brawijaya University, Faculty of Agriculture, with the aim of building the capacity of the Jayapura IPRE WG. One method employed is the introduction of Land-use Planning for Low-emission Development Strategies (LUWES). LUWES is an instrument developed by ICRAF to produce low-emission scenarios and formulate the implementing strategy.

# Kunjungan PAC memicu sinergisme dari beragam pihak Program LAMA-I di Sumatra Selatan

A visit by the Project Advisory Committee encourages synergy within LAMA-I in South Sumatra



photo: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre

**P**roject Advisory Committee (PAC) dari LAMA-I mengadakan kunjungan ke Provinsi Sumatra Selatan pada 8 September 2014. Anggota PAC yang turut serta dalam kunjungan ini adalah perwakilan *Environmental Support Programme* (ESP3) DANIDA, Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Hutan, dan mitra pelaksana proyek (CCROM dan GIZ).

Kunjungan anggota PAC diawali dengan mendatangi lokasi lokalatih lanjutan untuk perangkat *Land-use planning for low-emission development strategies* (LUWES), yang diselenggarakan di hotel Rio City Palembang. Dr. Suyanto perwakilan dari ICRAF dan Lars Møller perwakilan dari *Environmental Support Programme* (ESP3) DANIDA menyampaikan sambutan kepada peserta lokalatih yang berasal dari tiga kabupaten lokasi LAMA-I, yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Anggota PAC dan mitra pelaksana LAMA-I kemudian bertemu dengan pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Agenda utama pertemuan ini adalah melakukan dialog antara anggota PAC dengan pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, sekaligus menyampaikan hasil pelaksanaan LAMA-I periode Juli 2013-Juli 2014. Turut hadir dalam pertemuan ini adalah perwakilan dari Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Banyuasin.

Kepala Bappeda Sumatra Selatan Ir. Johannes Hasiholan MSc. beserta stafnya menyambut positif kunjungan anggota PAC dan mitra pelaksana LAMA-I. Pertemuan ini diawali dengan paparan Dr. Suyanto tentang beberapa capaian LAMA-I selama tahun pertama pelaksanaan di tiga kabupaten.

**T**he LAMA-I Project Advisory Committee (PAC) conducted a site visit in South Sumatra province on 8 September 2014.

The PAC members taking part in the visit were representatives of the Environmental Support Program of the Danish International Development Agency, the Research and Development Centre on Environmental Change and Forestry Policy (Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Hutan) and the program's implementing partners: Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and the Pacific and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

The visit began at the advanced training workshop on Land-use Planning for Low-Emission Development Strategies (LUWES), held at the Rio City Hotel, Palembang. Dr Suyanto (ICRAF), and Mr Lars Møller, representative of the Environmental Support Program, delivered the welcoming remarks to the participants, who came from the three LAMA-I project sites: Banyuasin, Musi Rawas and Musi Banyuasin.

The PAC members and the project's implementing partners subsequently attended a meeting with the South Sumatra Provincial Government. The main agenda of the meeting was to build a dialogue between the PAC members and the provincial government as well as to present the progress of the project from



Dialog yang terjadi di dalam pertemuan ini sangat menarik, dengan adanya antusiasme tinggi dari Kepala Bappeda Provinsi Sumatra Selatan yang menyampaikan bahwa LAMA-I merupakan suatu *soft project*, yang berarti tidak ada implementasi pada aspek infrastruktur maupun pembangunan fisik, sehingga menumbuhkan rasa “cinta” pada LAMA-I ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan Program. Johannes menambahkan bahwa pendekatan yang berbeda perlu dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi masing-masing kabupaten.

Di pertemuan itu, Johannes pun melakukan konfirmasi langsung pada perwakilan kabupaten mengenai kendala dan permasalahan yang terjadi di masing-masing kabupaten. Keberlanjutan sebuah program di daerah sangat didukung oleh niat politis dan kapasitas pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Johannes mendorong semangat untuk menciptakan sinergi di antara beragam pihak yang diawali dengan memfasilitasi para pelaksana LAMA-I untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah di tiga kabupaten. Pendekatan kepada pemerintah kabupaten dilakukan dengan audiensi bersama para kepala daerah di tiga kabupaten lokasi LAMA-I.

“Tugas pemerintah provinsi adalah menjembatani dialog antara pihak yang terkait, khususnya agar pemerintah kabupaten memahami permasalahan yang terjadi sehingga pemerintah provinsi bisa memberikan solusi kepada permasalahan tersebut melalui LAMA-I. Selain itu, salah satu strategi pendekatan kepada pemerintah kabupaten dapat dilakukan dengan menyajikan informasi yang berdasarkan basis bukti terkait permasalahan tata guna lahan di masing-masing kabupaten,” Johannes menambahkan.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan anggota PAC dan mitra pelaksana LAMA-I ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan. Sekretaris Kepala Dinas Provinsi Sumatra Selatan Ir. Zulfikar MM berpendapat bahwa LAMA-I ini dirasakan cukup strategis terkait dengan perencanaan daerah berbasis lahan.

Zulfikar menambahkan bahwa pengembangan ekonomi dan lingkungan kehutanan adalah bagian dari aksi mitigasi dan pembangunan ekonomi daerah. LAMA-I adalah program perencanaan pembangunan berbasis lahan dan 40% wilayah Sumatra Selatan merupakan wilayah kehutanan yang menjadikan perencanaan spasial sebagai salah satu penekanan di dalam proyek ini. Tantangan di masa depan adalah menetapkan perencanaan pembangunan tingkat provinsi yang dapat dikembangkan dengan basis spasial.

its beginning in July 2013 up until July 2014. Among those present at this meeting were representatives of the Banyuasin, Musi Rawas and Musi Banyuasin districts. Ir Johannes Hasiholan MSc (head of the Development Planning Agency) and his staff welcomed the visitors. Dr. Suyanto delivered the opening presentation, which outlined the achievements the project had made during its first year.

The discussions during the meeting generated great enthusiasm in Ir Johannes, who went on to say that he thought the project was a ‘soft project’ in that there was no implementation activities in terms of infrastructure nor was there any physical development. Thus fostering a sense of ‘passion’ for the LAMA-I would be a challenge. He suggested that a different approach would need to be adopted based on the unique situation and conditions of each district government.

Not concealing his passion for LAMA-I, Ir Johannes discussed with the district representatives the challenges facing their jurisdictions. The sustainability of a program in any given region, he emphasised, was greatly dependent on the political will and capacity of the local government. On this occasion, Ir Johannes further fuelled the spirit of the multi-party synergy by committing to facilitate communications between the governments of the three districts, beginning with meetings with the heads of the districts that are hosting the LAMA-I.

“The duty of the provincial government is to facilitate dialogue between related parties, particularly to help the district governments better understand the issues so that the provincial government can come up with solutions to such issues through the LAMA-I. Presenting local governments with evidence-based data related to land-use issues, particularly those hosting the three LAMA-I sites, would be a good strategy”, he added.

The meeting was followed by a visit to the South Sumatra Provincial Forestry Office, where the PAC members and implementing partners were welcomed by the secretary to the head of the Office, Ir Zulfikar MM, who said that the Forestry Office considered the LAMA-I to be strategic in nature with respect to land-based regional planning.

Zulfikar added that the forestry office must know how to develop the economy and forest land as part of [climate-change] mitigation measures and as part of regional economic development. The LAMA-I is a land-based development planning project and 40% of the geographical area of South Sumatra is comprised of forests. Spatial planning should be one of the focus areas of the program. The challenge will be how development planning at the provincial level can be undertaken on the basis of solid spatial planning.

A photograph of two men standing in a lush, green forest. The man on the left is wearing a blue long-sleeved shirt and white pants, leaning against a tree. The man on the right is wearing a light blue t-shirt and grey pants, standing with his hands on his hips. The forest is dense with tall trees and thick foliage.

# Belajar Cintai Alam dari Warga Kampung Adat Wambena

## Learning to Love Nature from the Wambena Village Tribe

Secara geografis kampung adat Wambena berada di wilayah pemerintahan Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Wambena dikelilingi oleh perbukitan yang membuat kampung adat ini sangat lestari dan sejuk, dan enak dipandang mata. Hamparan Samudra Pasifik yang berhadapan langsung dengan daerah kampung adat ini menambah kesan Wambena sebagai daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam.

Tetapi pada kenyataannya, semua kekayaan alam ini tidak membuat masyarakat Wambena bertindak semena-mena dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Mereka menjaganya agar terus lestari, sehingga bisa memberikan banyak manfaat bagi seluruh penduduk. Keramahan dan kecintaan warga Wambena terhadap alam tentunya patut ditiru semua pihak. Sikap semacam ini telah terbukti dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Sebagian besar masyarakat adat Wambena bekerja sebagai petani dan nelayan. Sistem pengolahan dan pemanfaatan lahan berdasarkan aturan adat dibagi menjadi dua yaitu aturan adat wilayah daratan dan wilayah lautan. Uniknyalah lagi, dalam mengelola atau memanfaatkan wilayah daratan maupun lautan, masyarakat juga diminta untuk terus menjaga dan melestarikan alam, sehingga ada hubungan timbal balik antara masyarakat dengan alam sekitarnya. Aturan ini sudah sangat melekat pada perilaku sehari-

Geographically speaking, the village of Wambena comes under the Depapre District administration, Jayapura Regency, Papua. The village is surrounded by hills, giving the impression of a pristine and fresh landscape to gaze upon. The vast Pacific Ocean can be seen from the village, further contributing to the image of a region that is rich in natural resources.

It should be realized, however, that the abundance of natural resources squandered by villagers living in Wambena have not blindly squandered this abundance of natural resources the land has to offer. Instead, they have consciously preserved the environment, allowing it to bestow great benefits to all people of the land. The nurture and love of the Wambena people of their environment should be an example to be replicated by everyone, as it they have proven to give back much benefit.

Most of the villagers in Wambena are farmers and fishermen. Tribal laws that provide for the management and use of resources are grouped into those that regulate the land and those that regulate the use of the marine resources. More uniquely, in managing or making use of the land and the sea, the people are also required to maintain and preserve the natural resources, thereby establishing a mutual relationship between humans and nature. This rule is so embedded in the daily activities of the



hari masyarakat Wambena. Kecintaan masyarakat Wambena terhadap alam didasari atas filosofi pesan leluhur yang sudah ada dan diwariskan turun-temurun. Masyarakat Wambena selalu berpegang teguh pada pesan leluhur yang berbunyi: "Kani nekewena delrei Nameng. Nau su plre Dalri supre, nemeng nei kong bwo. De dalrite telrena de walri, de naute telrena de wari" (Saya pergi ke darat saya hidup, saya pergi ke laut pun saya hidup).

Pesan ini menceritakan bahwa tanah diyakini sebagai ibu yang harus terus dijaga, sedangkan kekayaan alam dinilai layaknya air susu ibu yang bisa mengasahi dan memberikan kehidupan. Keyakinan ini menjadi dasar bagi seluruh warga Wambena untuk tetap menjaga tanah dan kekayaan alam yang mereka miliki.

Dalam pengelolaan wilayah daratan, aturan adat Wambena membagi pertanian dan perkebunan dengan jelas, dimulai dari dataran tinggi yang hanya boleh ditanami pohon kayu-kayuan, kemudian daratan yang lebih rendah dapat ditanami pepohonan rotan dan tanaman obat. Sedangkan pada wilayah dataran rendah yang berdekatan dengan permukiman warga, tanaman yang bisa ditanam adalah buah-buahan seperti mangga, sukun, pinang, dll.

Wilayah laut pembagiannya dibagi dari batas litoral pasang tertinggi. Di sini biota laut yang dibudidayakan adalah jenis kerang, kakap, lobster, dan ikan kapas. Kemudian pada kawasan selanjutnya, ikan yang dibudidayakan adalah jenis bebara dan suwo. Kepala suku kampung adat Wambena Yehuda Demetouw mengatakan bahwa pembagian ini bertujuan untuk melestarikan alam seperti yang telah diamanatkan oleh leluhur mereka secara turun-temurun.

Text by: Yessi Dewi Agustina, Josua Ormuseray/World Agroforestry Centre & YKPM

Wambenans that it can be said that no ever harms the environment.

The people's love of nature is reinforced by their traditional philosophy that has existed for decades. The Wambena community has always strictly abided by their ancestral motto of:

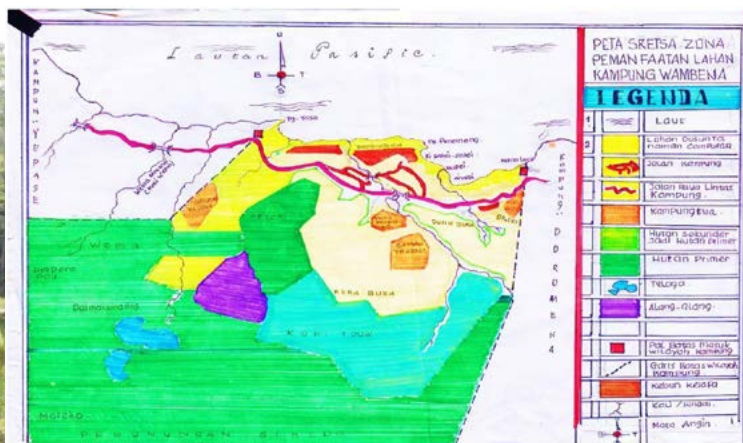
"The land is my mother, the sea and the soil is my mother's breasts" ("Kani nekewena delrei Nameng. Nau su plre Dalri supre, nemeng nei kong bwo." "De dalrite telrena de walri, de naute telrena de wari,") The traditional philosophy of this community, which safeguards their natural resources, has existed possibly for centuries.

This philosophy contains the message that the land is like a mother that must to be safeguarded, whereas the resources it contains is like breast milk that gives and nurtures life. Building upon this philosophy the Wambena community is committed to maintaining their land and natural treasures.

With regard to the management of the land, traditional laws have clearly determined areas for farms and plantations. The highlands can only be planted with woody plants, and other areas can be planted with rattan and medicinal herbs. Meanwhile, the lowlands, adjacent to human dwellings, can only be planted with fruits, such as mangos, *sukun* and *pinang*.

Apportionment of the sea provides for the area from the edge of the littoral zone at the highest tide to be used for breeding mussels, snapper, lobsters, and the *kapas* fish. The next zone is for the cultivation of *bebara* fish and *suwo* fish. The head of the village, Yehuda Demetouw, stated that this distribution is to preserve their resources as their ancestors have instructed.

photo: Josua Ormuseray/YKPM





# Berwisata Bomi di Taman Nasional Wasur

## Bomi Excursion to Wasur National Park

Program ParCiMon (*Participatory monitoring by civil society of land-use planning for low-emissions development strategy*) beserta Pokja Pembangunan Rendah Emisi Kabupaten Merauke berkesempatan mengunjungi Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke. Tujuan kunjungan ini adalah memberikan pelatihan kepada Pokja Kabupaten Merauke dalam pengukuran cadangan karbon, sekaligus menginventarisasi keanekaragaman hayati, dan mengukur kualitas air secara umum di Kabupaten Merauke.

Kunjungan ParCiMon ke Taman Nasional Wasur adalah bagian dari kegiatan pendampingan untuk Pokja Pembangunan Rendah Emisi Kabupaten Merauke dalam rangka menyusun strategi perencanaan pembangunan rendah emisi sekaligus meningkatkan kapasitas Pokja di dalam proses pemantauan dan evaluasi dengan metode partisipatif.

Salah satu keindahan alami pertama yang dapat dilihat di Taman Nasional Wasur adalah Bomi atau rumah rayap. Bentuk Bomi yang unik, menyerupai gundukan tanah berwarna cokelat dengan tinggi bisa mencapai 5 meter, memiliki keistimewaan yaitu rancangan ventilasi berupa lorong-lorong yang berfungsi untuk melindungi sarang dari air hujan dan membantu melepaskan panas ke udara ketika musim panas.

Bomi merupakan sarang berukuran besar yang dibangun oleh koloni rayap, menggunakan campuran dari rumput kering dan liur sebagai semen untuk merekatkan campuran itu. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk membangun istana rayap ini. Ratusan Bomi menjadi bagian utama dari keindahan alam Taman Nasional Wasur bukan hanya karena karena bentuk uniknya, tetapi juga karena konon hanya ada beberapa lokasi di dunia yang menjadi rumah bagi sarang rayap seperti ini.

The ParCiMon (Participatory monitoring by civil society of land-use planning for low-emissions development strategy) Program along with the Merauke Regency Low-Emission Development Working Group visited Wasur National Park, in Merauke Regency. The visit was aimed to provide training for the Merauke Working personnel in measuring carbon reserves, as well as to take stock of the biodiversity and measure the regency's water quality.

ParCiMon's visit to Wasur National Park was part of a series of assistance given to the Merauke Working Group in preparing a strategy for the planning of low-emission development as well as to build the working group's capacity in participatory monitoring and evaluation methods.

One of the natural wonders found in Wasur National Park are the Bomi (Termite House). The Bomi are the first amazing thing visitor's encounter when visiting the National Park. The Bomi are a unique shaped mound of dirt that can reach a height of five meters. They have a remarkable ventilation system consisting of a maze of tunnels that protect the colony from rainwater and help them to release heat into the air during the dry season.

The Bomi are built by colonies of ants out of mud, dried grass and their saliva as cement to hold everything together. A termite house takes a very long time to construct. Tens or even hundreds of these Bomi are a part of the beauty of Wasur National Park, not just because of their unique construction, but also because there are believed to be only a few places in the world where they exist.

In addition to the Bomi, 70% of the park's total area of 413,810 hectares consists of savana vegetation. A special plant that has become the emblem of Merauke City is the Maleluca or eucalyptus tree. Other vegetation that can be found the National Park



Tujuh puluh persen dari total luas wilayah Taman Nasional Wasur, yang mencapai 413.810 hektar, terdiri dari vegetasi savana. Tidak hanya Bomi, di Taman Nasional Wasur ini juga terdapat jenis tumbuhan istimewa yang menjadi ciri khas Merauke yaitu *Malaleuca sp* atau pohon kayu putih. Tumbuhan lain yang juga dapat ditemui di kawasan taman nasional ini adalah *Avicennia sp* atau pohon api-api, *Bruguiera sp* atau pohon tancang, dan *Terminalia sp* atau pohon ketapang.

Selain keanekaragaman flora, Taman Nasional Wasur memiliki satwa berbeda dengan satwa yang menghuni taman nasional lain. Sekitar 400 lebih jenis burung mendiami taman nasional ini. Jenis burung nuri kepala hitam, kakatua raja, dan cendrawasih merupakan spesies yang dapat dijumpai di Taman Nasional Wasur.

Tak perlu jauh-jauh ke Negara Australia, Taman Nasional Wasur juga di huni oleh beberapa jenis Kangguru, diantaranya *Macropus agilis* atau biasa disebut Walabi Lincih dan *Thylogale brunii* atau kangguru lapang.

Seiring dengan visi Taman Nasional Wasur yaitu terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem pendukungnya melalui pengembangan masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan, Taman Nasional Wasur memiliki beberapa program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap melestarikan alam. Beberapa suku asli yang tinggal di

includes the *Avicennia sp* (api-api tree), *Bruguiera sp* (tancang tree) and *Terminalia sp* (ketapang tree).

The Wasur National Park is renowned not only for its biodiversity, but also for the unique species of fauna that live within the forest that are not found in any other Indonesian national parks. The park is home to around 400 different species of bird. The black-capped Lory (*Lorius lory*), the Kakatua Raja and Cendrawasih birds are some of the species of fauna that can be found in Wasur National Park.

We do not need to go as far as Australia to find kangaroos. The Wasur National Park is also home to several species of kangaroo, namely the Agile Wallaby (*Macropus Agilis*) locally called the Walabi Lincih, and the kangguru lapang (*Thylogale brunii*).

In line with the vision of Wasur National Park is the conservation of biodiversity and maintenance of ecosystem supporters through community development in and around the area, Wasur National Park has several community development programs aimed at keeping the community that lived the national park area can increase welfare while preserving nature. Some of the indigenous tribes who live in and around the National Park Wasur called: Tribe Kanume, Maroni Men-Gey, Yeinan and Marind.

Wasur National Park is managed by the zoning system, which is divided into 4 zones: the core zone, the wilderness zone, the Utilization zone and residential zone. The core zone is meant for the protection of the original and distinctive biodiversity





photos: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre

dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Wasur yaitu : Suku Kanume, Maroni Men-Gey, Yeinan dan Marind.

Taman Nasional Wasur dikelola dengan sistem zonasi, yang terbagi menjadi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona pemukiman. Zona inti berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona rimba adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.

Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan jasa lingkungan lainnya. Zona religi, budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.

Sementara zona khusus adalah bagian dari taman nasional yang karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik, serta merupakan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun pemukiman penduduk yang peruntukan untuk pemukiman yang disebut dengan Kampung Wasur.

Kawasan Taman Nasional, dikenal sebagai Serengiti Papua, juga menyimpan kekayaan alam, berupa sumber air baku untuk masyarakat Merauke. Mata air yang bernama Rawa Biru ini memiliki luas sekitar 95 hektar dan menjadi sumber mata air paling besar dan utama di Merauke. Objek wisata alam dan kekayaan alam yang ada di dalam wilayah Taman Nasional Wasur membuat tempat ini wajib dikunjungi oleh beragam wisatawan. Berwisata sambil belajar melestarikan alam menjadi daya tarik Taman Nasional Ini.

representation. Wilderness zone is part of the national park which its location, condition and its natural resources, are capable to support the preservation of the core zone and the zone of utilization.

Utilization zone is part of a national park which its location, condition and its natural resources for the benefit of nature tourism and other environmental services. Zone religion, culture and history are part of the national park in which location provide religious sites, heritage or cultural heritage and history. This location is used for religious activities, and to protect cultural values and history.

While the special zone is part of a national park due inevitable conditions there have been communities that have lived in the area before designated as a national park. Communities facilities that has existed before the area becomes the national park are telecommunication facilities, transportation and electricity, as well as a center of economic growth and residential community, called Kampung Wasur.

The National Park, which is sometimes called Papua's Serengeti, also holds valuable water reserves for the people of Merauke. The Rawa Biru Spring covers an area of 95 hectares and is the primary and largest water source in Merauke. With its various natural attractions and rich resources, Wasur National Park is a destination worth visiting, where learning to preserve the environment is one of the Park's appealing features.

Text by: Yessi Dewi Agustina, Iwan Kurniawan S.Hut/World Agroforestry Centre, Balai Taman Nasional Wasur



## Wawancara / Interview:

**Ir. Basah Hernowo,**  
**Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air (Director of Forestry**  
**and Conservation of Water Resources), Bappenas**

photo: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre



# Peran Semua Pihak Dibutuhkan Dalam Mewujudkan Pembangunan Rendah Emisi

## The Role of Each Stakeholder is Necessary in Achieving Low-Emission Development

Kerja sama semua pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, dan sektor swasta tentu sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pembangunan rendah emisi di Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan rendah emisi, saat ini program *Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia* (LAMA-I) telah diujicobakan di 6 kabupaten dan 2 provinsi di Indonesia. LAMA-I merupakan program bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun strategi penurunan emisi dari sektor berbasis lahan yang bertujuan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan rendah emisi sebagai bagian penting dari rencana aksi mitigasi nasional.

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas, Ir. Basah Hernowo mengatakan, dalam mewujudkan pembangunan rendah emisi peningkatan kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga perlu dilakukan. KPH sendiri dibentuk sebagai wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara lebih efisien dan lestari.

Ir. Basah Hernowo yakin bila semua pihak bersinergi dengan baik, maka pembangunan rendah emisi di Indonesia dapat terwujud. Terkait hal tersebut, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai institusi perencanaan pembangunan di tingkat nasional juga turut mendukung program LAMA-I.

Cooperation among stakeholders including the national government, local governments, donor entities and the private sector, is unquestionably necessary in achieving low-emission development in Indonesia. In order to achieve low-emission development, the Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I) Program has to date been rolled out in six regencies (Kabupaten) and two provinces in Indonesia. LAMA-I is a program was established to develop the capacity of local governments in developing a strategy for reducing emission levels in land-based sectors aimed to ensure economic growth through low-emission policies, which constitute a crucial part in the national mitigation plan.

Bappenas Director of Forestry and Conservation of Water Resources, Ir. Basah Hernowo, stated that to achieve low-emission development, the performance of Forestry Management Units (KPH) also needs to be boosted. The KPHs themselves were created to provide a vehicle to implement forest management in a more efficient and sustainable manner.

Ir. Basah Hernowo is certain that if all parties concerned can act in synergy, low-emission development in Indonesia can be realised. In this regard, the Ministry of National Development Planning (PPN/Bappenas), as the development planning institution at the national level, is also supporting the LAMA-I Project.

LUWES News bulletin was able to interview the director in Jakarta. The following is an account of the interview with Ir. Basah Hernowo on the expectations, strategies, and policies of the government in lowering the emissions of the land-based sectors

LUWES *News bulletin* kali ini berhasil mewawancarai Ir. Basah Hernowo mengenai harapan, strategi, dan arah kebijakan pemerintah terhadap upaya penurunan emisi dari sektor berbasis lahan:

**T: Bagaimana pendekatan melalui KPH dapat secara efektif menurunkan tingkat emisi di Kabupaten Musi Banyuasin, dan apa saja yang perlu dilakukan LAMA-I untuk peningkatan kapasitas unit KPH?**

J: Pendekatan melalui KPH sangat efektif. Adapun permasalahan utama KPH adalah perambahan hutan. Terkait hal itu, pemerintah saat ini tidak ingin menimbulkan konflik berkepanjangan yang tidak ada solusinya. Sampai sekarang solusi yang bisa dilakukan ialah memberi kesempatan pada perambah untuk melakukan panen, setelah panen baru didiskusikan mengenai pembagian hasil antara masyarakat dengan pemerintah daerah/KPH setempat.

Dalam membantu meningkatkan kapasitas KPH ICRAF melalui LAMA-I dapat memberikan pengetahuan, penyuluhan, dan pendampingan mengenai sistem agroforestri sederhana yang memiliki fungsi ekonomi penting bagi masyarakat dan bisa menjadi sumber pemasukan. Melalui hal ini diharapkan sumber daya yang ada di KPH dapat menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada bagian hutan yang memiliki potensi untuk meningkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

**T: Bagaimana harapan, strategi, dan arah kebijakan nasional saat ini terkait upaya penurunan emisi dari sektor berbasis lahan di Indonesia?**

J: Penurunan emisi bukan merupakan pekerjaan yang hasilnya dapat dilihat dalam waktu singkat. Mengingat penghasil emisi datang dari multisektoral, maka kebijakan pemerintah daerah sangat berperan, terutama terhadap tata guna lahan dari sebuah wilayah.

Jurisdictional approach menurut saya sangat baik dilakukan di atas kertas, karena REDD+ diimplementasikan, diadministrasikan, dan diukur melalui unit pemerintahan pada semua level dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa. Terkait kebijakan, akan lebih baik bila masing-masing blok dapat diukur kinerjanya dan dihargai. Misalnya bisa ditetapkan hukuman bagi sektor yang tidak melakukan usaha menurunkan emisi. Kemudian, sebaliknya pemberian penghargaan juga dilakukan kepada blok/sektor yang melakukan kinerja dalam menurunkan emisi. Melalui langkah ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi yang melanggar dan memacu motivasi lebih besar bagi yang berkontribusi.

**T: Bagaimana kondisi terkini terkait pelaksanaan RAN dan RAD-GRK di daerah dan Apa saja yang menjadi hambatan dan kendala pelaksanaannya?**

J: RAN dan RAD merupakan hasil produk yang keputusannya adalah top to bottom. Riview RAN dan RAD dapat membantu dalam mengetahui lebih jelas mengenai target penurunan emisi yang telah ditetapkan. Dalam melakukan ground checking review RAN-RAD juga penting. Pasalnya, hal tersebut berguna untuk validasi data dalam menentukan target penurunan emisi sesuai dengan hasil

**Q: How would the KPH be able to effectively reduce emission levels in the Musi Banyuasin Regency, and what measures need to be taken by LAMA-I to enhance the capacity of the KPHs?**

A: The approach using the KPHs is very effective. The main issue for the KPHs to tackle is forest encroachment. In that regard the government does not want to create a prolonged conflict that has no solution. The best viable solution, so far, is to provide partnership between the forest squatters with the KPH as the forest management unit. From the partnership, community are legalized to participate in managing (not having) forest areas that have been encroached upon without changing the function as the forests, the sharing scheme of the product between the community and the local government/KPH can be discussed.

In supporting the KPH capacity building, ICRAF, through LAMA-I, can provide knowledge, education and assistance on basic agroforestry that can serve as an important economic function for the people and can potentially be a source of livelihoods. With this method it is expected that the human resources available in the KPHs can inform the communities that there are parts of the forest that can be manage together with the community through partnership scheme and have the potential to enhance the economy and welfare of the local people.

**Q: What are the expectations, strategies and national policies in relation to the efforts to reduce emissions of the land-based sectors in Indonesia?**

A: Efforts to lower emission levels do not yield results overnight. Given that emissions come from various sectors, the policies of the local governments play a major role in this effort, particularly with regard to zoning.

jurisdictional approach is a very worthwhile, well documented, approach that could be used as REDD+ is implemented, administrated, and measured through government units at every level from the province, regency, to the villages, Whereas the issue of deforestation and forest degradation is more accurately happened at the site level (KPH) and not at the level of government administration. Even at the KPH level is developed blocks of management.

With regard to policies, it would be preferable if the performance of each block is measured and given recognition accordingly. For instance, penalties can be imposed on sectors that do not succeeded to lower emissions. Conversely, rewards can be given to blocks/sectors that have managed to lower their emission levels.

In today's era of decentralization and dynamic changes in the spatial plans Jurisdictional Approach will then result the detriment of sectors that have a commitment to mitigate emissions reduction, including the forestry sector. This is caused by the emission reduction performance assessment done accumulatively Crossed-sector within the region administrative boundary. The Progress of mitigation undertaken by the forestry sector may not have any value if other sectors such as mining, industry, energy, and other sectors are very massive in emitting.

Therefore, the emission reduction performance appraisal should be done by sector to a maximum level of emission. This measure is expected to act as a deterrent for those who fail to comply and not fully committed to reduce emission and in the other hand provide further motivation for those that contribute.

ground checking. Dengan luas wilayah hutan di Indonesia yang lebih dari 120 juta hektar tentu pelaksanaan RAN-RAD pasti tidak mudah, namun saya optimis ini bisa dilaksanakan dengan baik.

**T: Adakah kebijakan atau strategi pemerintah nasional untuk mendorong penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK di tingkat kabupaten?**

J: Belum ada kebijakan di tingkat nasional untuk mendorong penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK di tingkat kabupaten. Namun, kami sangat mendukung bila ada kepala daerah yang memiliki visi baik mengenai pembangunan rendah emisi, karbon fund, atau karbon market di wilayahnya.

**T: Menurut Anda, bagaimana seharusnya pembagian peran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam proses penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK?**

J: Diharapkan pada pemerintah yang baru nanti, proses penyusunan dan pelaksanaan tidak lagi bersifat top to bottom tapi juga bottom up, sehingga proses perencanaan akan lebih terencana berdasarkan data dan input dari kabupaten.

**T: Apakah inisiatif Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD-GRK dapat membantu mengawasi sejumlah upaya yang telah dilakukan?**

Terkait ini saya belum bisa banyak berpendapat. Hal yang diketahui ialah evaluasi dan pelaporan yang ada saat ini baru berdasarkan citra satelit, padahal ground checking juga perlu dilakukan. Tetapi dalam penerapannya, ground checking tidaklah mudah karena memerlukan sumber daya yang besar.

**J: Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam merencanakan serta melaksanakan upaya penurunan emisi dari sektor berbasis lahan dan apa yang seharusnya dilakukan pemda terkait hal tersebut?**

Belum seluruh daerah siap, karena tidak semua kepala daerah menganggap isu ini sebagai prioritas. Masih banyak pihak yang belum menyadari bahwa trade off economy dengan pembangunan rendah emisi ini tidak seluruhnya merugikan daerah, tetapi malah akan menguntungkan di masa mendatang. Bagi kepala yang sudah menyadari pentingnya hal ini diharapkan bisa meneruskan pembangunan tersebut di wilayahnya, sehingga isu lingkungan menjadi prioritas yang terus dilakukan

**T: Bagaimana pandangan Anda mengenai relevansi upaya penurunan emisi pada pemerintahan baru saat ini?**

J: Sebenarnya belum ada sinyal mengenai arah kebijakan pemerintahan yang baru ini. Namun, Presiden terpilih sudah pernah mengatakan program-program rehabilitasi hutan dan peta konversi hutan dan diharapkan hal ini bisa benar-benar dilakukan.

**Q: What is the current condition of the implementation of RAN and RAD-GRK in the regions and what are the impediments and hurdles for such implementation?**

A: RAN and RAD are the products of a top down decision. A review of RAN and RAD could help in determining more clearly the agreed targets for emission reduction. With regard to ground checking, such a review is also important, it is useful for validating data to determine the targets for emission reduction. With Indonesia's total forest area of 120 million hectares, implementing RAN and RAD is not so easy. However, I am optimistic that they can be successfully achieved.

**Q: Are there any national government policies or strategies to encourage the formulation and implementation of RAD-GRK at the regency (kabupaten) level?**

A: As yet no policy has been issued at the national level to push for the preparation and implementation of RAD-GRK at the regency level. Nonetheless, we would support any head of regional government that possesses a well-rounded vision for low-emission development, carbon funding, or carbon marketing for the respective jurisdiction.

**Q: In your view, how should the roles be distributed between the provincial and regency government with regard to the formulation and implementation of RAD-GRK?**

A: It is hoped that with the new administration, the formulation and implementation process would not only be top down but also bottom up, so that the planning process would rely more on data and inputs from the regencies.

**Q: Can the Monitoring, Evaluation and Reporting (Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan – PEP) of the RAD-GRK contribute to overseeing the various measures that have been carried out?**

A: I cannot say much on this right now. What I know is that the current evaluation and reporting is still based on satellite imagery, while ground checking is also necessary. In practice, however, ground checks are not easy to conduct, as they require extensive resources.

**Q: How prepared are the local governments in planning and executing measures to lower the emissions of land-based sectors and what should the local governments do in this regard?**

A: Not all the regions are prepared, as not all heads of local governments consider this a priority. There are many who do not realize that the economic trade off for low-emission development is not necessarily detrimental to the region, but instead will be beneficial in the long run. It is hoped that the heads of local governments who have realized this will continue development in their respective regions, thus making environmental issues a continuing priority.

**Q: What is your view on the relevance of low-emission measures for the new administration?**

A: Actually, there is yet no indication of the policy direction of the new government. However, the president-elect has mentioned forest rehabilitation programs and forest conversion mapping, and it is hoped that they will eventually be implemented.





**ParCiMon** is designed to support Papua in achieving its low-emission development goal and contributing significantly to Indonesia's overall low-emission development as an integral part of climate-change strategies. It focuses on building the capacity of key civil society groups in Papua to participate and monitor the planning cycle of low-emission development from land-based sector

*ParCiMon* didesain guna mendukung Papua mencapai pembangunan rendah emisi sebagai wujud kontribusi Papua dalam mensukseskan strategi mitigasi perubahan iklim nasional melalui program pembangunan kapasitas masyarakat sipil pada proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan rendah emisi berbasis lahan

**LAMA-I** aims to strengthen the capacity of key local governments to develop integrated low-emission development plans as part of Indonesia's nationally appropriate mitigation actions

*LAMA-I* berupaya membangun kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan rendah emisi yang terintegrasi sebagai bagian penting dari aksi mitigasi perubahan iklim nasional

### **World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program**

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115  
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia

Tel: +62 251 8625415; Fax: +62 251 8625416

[www.worldagroforestry.org/regions/southeast\\_asia](http://www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia)



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK  
**DANIDA** | INTERNATIONAL  
DEVELOPMENT COOPERATION



Research  
Program on  
Forests,  
Trees, and  
Agroforestry



**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

